

**HAK ANAK LUAR KAWIN TERHADAP HARTA PENINGGALAN
AYAHNYA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR : 46/PUU-VIII/2010 MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Penetapan Nomor : 0156/Pdt.P/2013/PA.JS)**

Oleh :

Gita Sevtania Wardhani,¹ Hartini.²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi dan untuk mengetahui sifat penetapan yang menentukan adanya kewajiban untuk memberikan wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian pada Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 0156/Pdt.P/2013/PA.JS, menurut Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang menitikberatkan kepada penelitian dokumen dan ketentuan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran bahan kepustakaan. Penelusuran bahan kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun anak luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya namun antara keduanya memiliki hubungan keperdataan terbatas, yaitu ayah biologis berkewajiban untuk mencukupi kebutuhan hidup anak luar kawin tersebut sampai dewasa atau berdiri sendiri dan memberikan sejumlah harta yang telah ditentukan besarnya oleh hukum melalui *wasiat wajibah* maksimal 1/3 bagian harta warisan setelah ia meninggal dunia. Penetapan tersebut sifatnya tidak imperatif karena hanya merupakan kebenaran sepihak, kekuatannya hanya mengikat diri para pemohon sehingga tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian pada pihak manapun. Karena penetapan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial maka tidak dapat diminta eksekusi pada Pengadilan.

Kata kunci : Anak Luar Kawin, Waris Islam, Hukum Islam.

¹ Jalan Ahmad Yani RT 003/RW 006 Klakublik, Sorong, Papua Barat.

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

**THE RIGHTS OF ILLEGITIMATE CHILD TOWARDS THE FATHER'
LEGACY THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT
NUMBER: 46/PUU-VIII/2010 ACCORDING TO ISLAMIC LAW
(Determination Study Number: 0156 / Pdt.P / 2013 / PA.JS)**

By:

Gita Sevtania Wardhani,¹ Hartini.²

ABSTRACT

This study aims to know form of relationship between illegitimate child with his biological father after the release of the decision of the Constitutional Court and to determine the nature of the determination which determines 1/3 a maximum amount of legacy at the decision of South Jakarta Religious Court Number : 0156 / Pdt.P / 2013 / PA.JS, according to Islamic law.

This study uses normative juridical approach, with an emphasis on the study of documents and statutory provisions. Data collected by the literature search. Search the literature was done by collecting and studying legal materials sourced from the primary legal materials, secondary and tertiary. Once all the data is collected and analyzed using qualitative analysis.

The results showed that although the illegitimate child does not have *nasab* relationship with a man who caused his birth, however between them have limited civil relationship. The biological father is obligated to provide the needed to the illegitimate child until adulthood or stand alone and provide a number of treasures that have been determined by the magnitude of the law by a *wasiat wajibah*, 1/3 of maximum amount of legacy after he died. Such determination is unimperative because it is only the truth unilaterally, just bind the applicant so it has not value of the strength of evidence to any parties. Such determination has not execution strength so it could not execute to the court.

Keywords : Illegitimate child, Islamic legacy, Islamic law.

¹ Ahmad Yani Street, RT 003/RW 006 Klakublik, Sorong, Papua Barat.

² Faculty of Law Gadjah Mada University, Yogyakarta.